

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK GURU
BK: STUDI KASUS DI SMP NEGERI 2 SUKODONOThe Implementation of Guidance and Counseling Educator
Development: A Case Study at SMP Negeri 2 SukodonoJazilatur Rochmah¹, Nadia Eka Dewi Safitri², Syunu Trihantoyo³

Universitas Negeri Surabaya

jazilatur.23189@mhs.unesa.ac.id; nadia.23141@mhs.unesa.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 30, 2024	May 3, 2024	May 6, 2024	May 9, 2024

Abstract

The arrangement on the advancement of counseling instructors is an imperative perspective of making strides the quality of direction and counseling administrations in present day instructive settings. This brief examines the challenges and prospects of implementing such a policy in the current educational environment. Challenges include limited resources, gaps in access to training and resistance to change. Be that as it may, with the proper approach, there's extraordinary potential to move forward the quality of instructive administrations, back all encompassing understudy improvement and create a positive learning environment. Recommendations include updating curricula, improving accessibility to training, emphasizing practical skills, strong organizational support, building professional networks and continuous evaluation. By actualizing these proposals, it is anticipated that the usage of the counseling instructor teacher improvement arrangement will have a positive affect on the quality of instruction and the welfare understudies.

Keywords: *Implementation, Policy, Development, Counseling Teachers, Educators*

Abstrak: Kebijakan mengenai pengembangan guru BK merupakan aspek penting untuk memperbaiki kinerja guru BK dalam lingkungan pendidikan modern. Laporan singkat ini mengkaji tantangan dan prospek penerapan kebijakan tersebut di lingkungan pendidikan saat ini. Tantangannya mencakup terbatasnya sumber daya, kesenjangan akses terhadap pelatihan, dan penolakan terhadap perubahan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, terdapat potensi besar untuk meningkatkan

kualitas layanan pendidikan, mendukung pengembangan siswa secara holistik, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Rekomendasinya antara lain memperbarui kurikulum, meningkatkan aksesibilitas pelatihan, menekankan keterampilan praktis, dukungan organisasi yang kuat, membangun jaringan profesional, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan penerapan kebijakan pengembangan tenaga pendidik guru BK akan berdampak positif terhadap mutu pendidikan dan kesejahteraan peserta didik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengembangan, Guru BK, Tenaga Pendidik

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai bidang sangat esensial dalam pembangunan suatu negara. Pembimbing memiliki kewajiban yang sangat penting dalam menghasilkan generasi yang terampil dan berdaya saing di zaman modern. Hal ini sangat penting untuk lebih mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik seperti guru BK. Kebijakan pengembangan tenaga pendidik dan Sumber Daya Manusia merupakan inisiatif pemerintah untuk memajukan mutu pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia. Strategi ini memiliki tujuan untuk menambahkan kapasitas dan kualitas guru sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan efektif kepada siswa. Profesionalisasi pelatihan guru dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain penyiapan program pelatihan dan pengembangan kapasitas guru, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan guru, serta pemberian insentif kepada guru yang berhasil melakukan peningkatan. Kualitas Kualitas pembelajaran. Penerapan kebijakan ini memerlukan peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat. Kebijakan yang tepat dan dilaksanakan dengan baik untuk mengembangkan profesionalisme dan tenaga pengajar dengan harapan dapat memajukan mutu pengetahuan dan pemahaman untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi.

BK adalah sistem yang terus mengembangkan kemampuan dalam mengenali dan memahami situasi siswanya serta mengambil keputusan terbaik (penilaian profesional) sesuai dengan perannya dengan cara yang bertanggung jawab, independen, dan bijaksana. Penyelenggaraan penyajian orientasi dan pemberian nasihat yang komprehensif selaras dengan minat siswa untuk memberikan layanan terpadu. Sehingga sesuai dengan prinsip kurikulum mandiri yang berfokus pada peserta didik, tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan profesi, serta saran dalam mengembangkan

kebijakan pengembangan profesionalisme bagi guru BK dan tenaga kependidikan di masa mendatang.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . Penelitian Tersebut fokus pada pengembangan pelatih guru BK di kabupaten Sidoarjo dan dilakukan di SMP Negeri 2 Sukodono yang menjadi tempat penerapan pedoman pengembangan guru BK, dan tenaga pendidik. Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan di sekolah, antara lain guru TU, guru BK, dan, siswa/siswi SMP Negeri 2 Sukodono.

Teknik pengumpulan fokus pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian yang dilakukan selama kurang lebih satu minggu. Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai analisisnya. Kami menggunakan alat bantu untuk observasi dan wawancara seperti buku catatan, bulpoin, kamera handphone untuk mempermudah pengelolaan data.

HASIL

Pada bagian pembahasan menekankan pada tenaga pendidik guru BK, peran dan pentingnya kebijakan pengembangan bagi guru BK , tantangan atau hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan tenaga pendidik, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam implementasi kebijakan pengembangan bagi guru BK di masa mendatang. Dokumentasi, observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Hasil survei tercantum di bawah ini dan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara.

1. Bagaimana peran dan pentingnya kebijakan pengembangan tenaga pendidik guru BK dalam lingkungan pendidikan saat ini



Gambar 1 Implementasi kebijakan

Kebijakan dalam pengembangan tenaga pendidik guru BK di SMP Negeri 2 Sukodono memegang suatu peran yang sangat penting untuk menghasilkan kualitas layanan yang lebih baik untuk pendidikan bagi siswa. Peningkatan keahlian akan memungkinkan guru BK dan staf kependidikan untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa melalui bimbingan dan nasihat ketika mereka menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah akademik, emosional, dan sosial. Kebijakan pengembangan profesi di SMP Negeri 2 Sukodono juga dapat membantu sekolah memperkenalkan pendekatan pendidikan yang lebih holistic yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, namun juga berfokus memperhatikan aspek psikososial dan emosional siswa.

2. Tantangan atau hambatan yang ditemui dalam mengikuti atau mengimplementasikan kebijakan

Tantangan yang dihadapi guru BK SMP Negeri 2 Sukodono dalam permendikbud no.111 tentang melaksanakan tugas guru BK. Keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran, waktu, dan ketersediaan guru yang berkualitas untuk pelatihan dan pendidikan lebih lanjut, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang menyatakan siswa SMP Negeri 2 Sukodono berpendapat bahwasanya guru BK ialah polisi sekolah, siswa juga masih kurang mengetahui adanya guru BK, bahwa guru bk adalah partner dari orang tua yang bisa membantu apapun kesulitan yang dialami oleh siswanya (Yuniar, 2024).

Table 1. Perbandingan jumlah guru BK dan siswa

No	keterangan	Jumlah	Laki-laki	perempuan
1	Guru BK	5	2	3
2	Siswa/Siswi SMP Negeri 2 Sukodono	+1.029	45%	55%

Dari tabel di atas jumlah tenaga pendidik guru BK masih kurang dan tidak sebanding dengan jumlah siswa/siswi SMP Negeri 2 Sukodono, yang seharusnya satu guru menangani 150 murid tetapi sekarang satu guru BK menangani 300 murid yang bermasalah.

3. Apa saran untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam implementasi kebijakan pengembangan bagi tenaga pendidik guru BK di masa mendatang

Memastikan kebijakan pengembangan tenaga pendidik guru BK mendapat dukungan kuat dari pimpinan sekolah dan lembaga. Melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas program pengembangan profesional dan mengidentifikasi area yang masih kurang baik. Sehingga dapat melakukan survei kepuasan partisipan, analisis hasil pembelajaran, atau studi kasus penerapan praktik baru di lembaga.

PEMBAHASAN

Dilihat dari siklus kebijakan, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang paling penting (Subarsono, 2005). Udoji 1981 menyatakan dalam (Subarsono, 2005): “Implementasi kebijakan itu penting, bahkan mungkin lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan jika tidak diimplementasikan akan menjadi impian dan rencana yang baik, tersimpan rapi di arsip (Herabidin), 2016) menyatakan bahwa tahapan implementasi adalah tahapan antar kebijakan. Tahap persiapan dan hasil atau efektivitas kebijakan. Menurut Gerge Edwards III, ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. “Pengembangan Konselor Karir” menitikberatkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan keterampilan konselor karir.

Secara teoritis, Edwards III menekankan pentingnya pengembangan keterampilan konselor dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Guru bimbingan dan konseling dituntut mempunyai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta harus mampu membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Pengembangan guru bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan pengembangan keterampilan guru bimbingan dan konseling dalam mengajar dan mengembangkan kurikulum. Pengembangan keterampilan guru dalam bimbingan dan konseling dicapai melalui pemahaman yang lebih rinci dan mendalam tentang berbagai landasan peraturan, hakikat pembelajaran mandiri, petunjuk pelaksanaan program pembelajaran mandiri, serta identifikasi dan analisis permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan. Guru bimbingan dan konseling harus mempunyai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan siswanya dan masyarakat, serta harus mampu membuat kurikulum

yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Dalam melaksanakan pelatihan pelatih bagi pengawas bimbingan/pembimbing, kerjasama antara pengawas bimbingan/pembimbing dengan guru mata pelajaran sangatlah penting. Guru bimbingan dan konseling serta guru mata pelajaran mempunyai peranan dalam mengidentifikasi kesehatan psikis peserta didik dan mendorong perkembangannya agar potensi dirinya dan mencapai perkembangan yang optimal dapat dilakukan secara kolaboratif. Layanan penasihat intrakurikuler independen melibatkan kolaborasi antara penasihat, guru mata pelajaran, dan staf kependidikan lainnya. Layanan ini mencakup empat bidang: pribadi, sosial, pembelajaran, dan karir, dan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti penilaian siswa, konseling, dan pengawasan, tergantung pada kebutuhan dan keadaan sekolah. Praktik pelatihan instruktur dan supervisor berdasarkan teori Edwards III dapat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan pengembangan keterampilan mengajar serta pengembangan kurikulum instruktur dan supervisor. Dalam melaksanakan pelatihan pendidik bimbingan/penyelia, kerjasama antara pengawas bimbingan dan guru mata pelajaran sangatlah penting. Layanan konsultasi intrakurikuler independen mencakup kolaborasi antara konselor bimbingan karir, guru mata pelajaran, dan staf kependidikan lainnya.

Sementara itu pakar ahli lain mengatakan (Sumarwoto,V,D. 2008), seorang pakar pendidikan yang terkenal dengan penelitiannya di bidang pendidikan dan pengembangan tenaga pendidik, memberikan wawasan yang berharga. Vitalis Djarot Sumarwoto berpendapat bahwa peran bimbingan dan nasehat guru dan tenaga kependidikan sangat penting dalam memberikan bimbingan, nasihat dan dukungan kepada siswa dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, emosional dan akademik. Kebijakan pengembangan profesional penting untuk memastikan bahwa guru BK dan staf pendidikan mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui pelatihan dan pengembangan yang tepat, kita dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan pendidikan yang komprehensif.

Beberapa tantangan yang dapat muncul ketika menerapkan kebijakan pengembangan tenaga pendidik guru bk seperti di SMP Negeri 2 Sukodono keterbatasan dalam sumber daya, waktu, serta dukungan dari pihak yang terkait. Kurangnya pelatihan berkualitas serta kesempatan untuk berbagi praktik terbaik juga dapat menjadi hambatan. Untuk mengatasi tantangan ini guru BK berharap agar kebijakan yang akan mendatang agar lebih seimbang antara jumlah tenaga pendidik guru BK dengan siswa yang ada. (Sumarwoto,V,D. 2008)

menyarankan agar pemerintah, lembaga pendidikan, dan badan profesional bekerja sama untuk menyediakan sumber daya, mendukung upaya pelatihan, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan. (Sumarwoto,V,D. 2008) merekomendasikan bahwa perbaikan implementasi kebijakan spesialisasi memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini termasuk menetapkan program pelatihan yang berkelanjutan, memperkuat kolaborasi antara pihak yang terkait, dan mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program pelatihan tersebut. Selain itu, (Sumarwoto,V,D. 2008) juga menekankan pentingnya penelitian dan evaluasi berkelanjutan untuk lebih memahami tantangan dan keberhasilan dalam upaya pengembangan profesional bagi konselor bimbingan karir dan staf kependidikan. Mencermati pandangan (Sumarwoto,V,D. 2008), maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesi guru pembimbing dan tenaga pendidik berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, untuk mencapai hal ini membutuhkan kerja sama yang erat diantara pemangku kepentingan dan pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam penerapan kebijakan spesialisasi.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil wawancara dan observasi di SMP Negeri 2 Sukodono dapat disimpulkan masih terdapat kekurangan guru BK di sekolah ini. Kurangnya guru BK di sekolah dapat menambah beban kerja guru BK yang ada. Karena beban kerjanya yang berat, guru BK mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk berinteraksi secara efektif dengan setiap siswa, sehingga siswa mungkin tidak memahami peran guru BK sebagai peran positif yang sebenarnya. Mereka tidak menyadari bahwa guru BK bukanlah polisi sekolah, melainkan partner dari orang tua yang tugasnya memberikan bimbingan, nasehat dan dukungan bagi pengembangan pribadi, sosial dan akademik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini memerlukan upaya bersama dari sekolah, guru BK, siswa, dan orang tua untuk meningkatkan pemahaman tentang peran guru BK yang sebenarnya. Hal ini dapat mencakup program sosialisasi yang lebih efektif, pelatihan bagi guru BK untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan konseling mereka, dan peningkatan akses terhadap layanan BK di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah. Dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia Bandung.
- Kemendikbudristek. (2020). *Implementasi Bimbingan dan Konseling untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemendikbudristek BSKAP RI.
- S. Hadi. (2018). Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Di Sdlb Kota Bandung. *J. Ilmu Polit. dan Komun.*, vol. 8, no. 1, doi: 10.34010/jipsi.v8i1.877.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar Jakarta.
- Sumarwoto,V,D. (2008). *Implementasi profesionalisme guru dalam Memotivasi belajar siswa di sekolah dasar*. Media Neliti Publications.